

KONFLIK PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern)

Ellya Rosana*

Abstrak

Manusia adalah makhluk konflikologis yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik secara sukarela maupun terpaksa. Hal tersebut tidak dapat dihindari karena merupakan aspek permanen dalam kehidupan sosial. Konflik pada tataran tertentu sangat diperlukan sebagai sarana perubahan manusia sebagai anggota masyarakat agar menjadi lebih baik. Pandangan kontemporer mengenai konflik didasarkan pada anggapan bahwa konflik sesuatu yang tidak dapat dielakkan sebagai konsekuensi logis interaksi manusia. Namun yang menjadi persoalan adalah bukan bagaimana meredakan konflik, tapi bagaimana menanganinya secara tepat sehingga tidak merusak hubungan antarpribadi bahkan merusak organisasi. Konflik bukan dijadikan suatu hal yang destruktif, melainkan harus dijadikan suatu hal konstruktif agar kehidupan masyarakat menjadi tertib.

Kata Kunci : Konflik, Teori Konflik, Penyelesaian Konflik

A. Pendahuluan

Pada hakikatnya konflik merupakan suatu pertarungan menang-kalah antar kelompok atau perorangan yang berbeda kepentingannya satu sama lain dalam organisasi. Atau dengan kata lain, konflik adalah segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik antara dua atau lebih pihak. Pertentangan kepentingan ini berbeda dalam intensitasnya tergantung pada sarana yang dipakai. Masing-masing ingin membela nilai-nilai yang telah menganggap mereka benar, dan memaksa pihak lain untuk mengakui nilai-nilai tersebut baik secara halus maupun keras.

Timbulnya konflik berangkat dari kondisi kemajemukan struktur masyarakat dan konflik merupakan fenomena yang sering terjadi sepanjang proses kehidupan manusia. Dari sudut

mana pun kita melihat konflik, bahwa konflik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial. Didalam kenyataan kehidupan manusia dimana pun dan kapan pun selalu ada bentrokan sikap-sikap, pendapat-pendapat, perilaku-perilaku, tujuan-tujuan, dan kebutuhan-kebutuhan yang selalu bertentangan sehingga proses yang demikian itulah yang akan mengarah pada suatu perubahan.¹

Konflik pada umumnya berlatar belakang adanya perbedaan. Perbedaan sendiri adalah bagian tak terpisahkan dari realitas kehidupan. Perbedaan bisa menjadi potensi bisa menjadi persoalan. Menjadi potensi jika dipahami secara baik dan dikelola secara konstruktif agar semakin memperkaya makna hidup. Bisa menjadi persoalan jika kemudian berkembang menjadi bentuk penyelesaian dengan cara-cara kekerasan. Konflik juga dapat bernilai positif, yaitu pada saat konflik bisa dikelola secara arif dan bijaksana, disini konflik bisa mendinamisasi proses sosial dan bersifat konstruktif bagi perubahan sosial masyarakat dan tidak menghadirkan kekerasan, sehingga konflik bisa dikonotasikan sebagai sumber perubahan².

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

B. Dasar-dasar Teori tentang Konflik

Dalam sosiologi, kita mengenal adanya teori konflik yang berupaya memahami konflik dari sudut pandang ilmu sosial. Teori konflik adalah sebuah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang

¹ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h. 186.

² Abdul Jamil Wahab, *Manajemen Konflik Keagamaan Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual* (Jakarta : Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia, 2014), h. 6.

membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori konflik lahir sebagai sebuah antitesis dari teori struktural fungsional yang memandang pentingnya keteraturan dalam masyarakat.

Teori konflik ini dibangun dalam rangka untuk menentang secara langsung terhadap teori struktural fungsional,³ karena itu tidak mengherankan apabila preposisi yang dikemukakan oleh penganutnya bertentangan dengan preposisi yang terdapat dalam teori struktural fungsional. Kalau menurut teori struktural fungsional memandang masyarakat dalam kondisi statis atau lebih tepatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan, maka menurut teori konflik malah sebaliknya. Masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai dengan pertentangan yang terus menerus diantara unsur-unsurnya. Kalau menurut teori struktural fungsional setiap elemen atau setiap institusi memberikan dukungan terhadap stabilitas maka teori konflik melihat bahwa setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disitegrasi sosial. Kontras lainnya adalah bahwa penganut teori struktural fungsional melihat anggota masyarakat terikat secara informal oleh nilai-nilai, norma-norma, dan moralitas umum, maka teori konflik menilai keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan orang yang berkuasa.⁴

Teori konflik yang terkenal adalah teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx mengenai teori kelas. Dengan munculnya kapitalisme terjadi pemisahan yang tajam antara mereka yang menguasai alat produksi dan mereka yang hanya mempunyai tenaga. Pengembangan kapitalisme memperuncing

³ Dikatakan bertentangan dengan teori structural fungsional karena teori struktural fungsional member tekanan yang lebih kepada keteraturan (order) dalam masyarakat dan mengabaikan konflik serta perubahan sosial. Hal ini mengakibatkan golongan fungsional ini dinilai secara idiologis sebagai konservatif. Secara sosiologis teori ini berusaha untuk mempertahankan golongan status quo, bahkan ada yang menilai ia adalah sebagai agen status quo.

⁴ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali, 1985), h. 30-31.

kontradiksi antara kedua kategori social sehingga akhirnya terjadi konflik diantara kedua kelas. Eksploitasi yang dilakukan oleh kaum borjuis terhadap kaum proletar secara terus menerus akhirnya akan membangkitkan kesadaran kaum proletar untuk bangkit dan melawan sehingga terjadilah perubahan social besar, yaitu revolusi sosial. Menurut ramalan Marx kaum proletar akan memenangkan perjuangan kelas ini dan akan menciptakan masyarakat tanpa kelas dan tanpa Negara⁵

Teori konflik lainnya adalah teori yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf yang mengemukakan bahwa masyarakat terdiri atas organisasi-organisasi yang didasarkan pada kekuasaan (dominasi satu pihak atas pihak lain atas dasar paksaan) atau wewenang (dominasi yang diterima dan diakui oleh pihak yang didominasi) yang dinamakan "*Imperatively coordinated associations*" (asosiasi yang dikoordinasi secara paksa) karena kepentingan kedua pihak dalam asosiasi-asosiasi tersebut berbeda. Pihak penguasa berkepentingan untuk mempertahankan kekuasaan, sedangkan pihak yang dikuasai berkepentingan untuk memperoleh kekuasaan yang dapat menyebabkan perubahan sosial. Dengan demikian, konflik menurut Dahrendorf merupakan sumber terjadinya perubahan sosial.⁶

Pokok pikiran yang terkandung menurut teori konflik yang dikemukakan oleh Dahrendorf adalah :

1. Setiap masyarakat manusia tunduk pada proses perubahan; perubahan ada dimana-mana
2. Disensus dan konflik terdapat dimana-mana
3. Setiap unsur masyarakat memberikan sumbangan pada disintegrasi dan perubahan masyarakat
4. Setiap masyarakat didasarkan pada paksaan beberapa orang anggota terhadap anggota lain⁷

Teori konflik berikutnya yang juga mempengaruhi teori konflik dalam sosiologi adalah teori yang dikemukakan oleh Lewis A. Coser. Menurut definisi kerja Coser konflik adalah perjuangan mengenai nilai serta tuntutan atas status, kekuasaan,

⁵ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), h. 218.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencederai, atau melenyapkan lawan. Kajian Coser terbatas pada fungsi positif dari konflik, yaitu dampak yang mengakibatkan peningkatan dalam adaptasi hubungan sosial atau kelompok tertentu.⁸

Selanjutnya terdapat teori model konflik (*conflick model*, *dwang model*) bagi suatu masyarakat, yaitu model konflik yang memiliki anggapan dasar adalah sebagai berikut:⁹

1. Ciri yang melekat pada setiap masyarakat adalah proses perubahan
2. Pada setiap masyarakat terdapat konflik dan hal tersebut merupakan gejala yang wajar
3. Pada setiap bagian dari masyarakat terdapat peluang untuk terjadinya integrasi dan perubahan sosial
4. Adanya sejumlah orang yang mempunyai kekuasaan merupakan faktor integrasi yang penting
5. Pengendalian konflik dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial tertentu yang berfungsi untuk menciptakan akomodasi

Sedangkan yang merupakan anggapan dasar dari teori konsensus (teori harmonis) adalah sebagai berikut:

1. Sistem sosial dalam masyarakat merupakan suatu sistem aksi yang terbentuk dari interaksi sosial yang terjadi antara berbagai individu yang tumbuh atas dasar suatu standar penilaian yang telah disepakati
2. Konsensus diantara warga masyarakat mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu merupakan faktor integratif yang paling utama
3. Masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem yang mencakup bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi
4. Ada kecenderungan yang kuat dari masyarakat untuk bergerak ke arah ekuilibrium tertentu

⁸ *Ibid*, h. 219.

⁹ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, kekuasaan, dan Masyarakat* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), h. 96-97.

5. Penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat lama kelamaan akan teratasi melalui suatu proses penyesuaian dan proses pelembagaan
6. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat bersifat gradual
7. Kontinuitas sistem sosial dapat dipelihara dengan dua mekanisme sosial yang pokok, yakni sosialisasi dan kontrol sosial

Selanjutnya ada teori interaksionalisme simbolis yang pada prinsipnya menyatakan bahwa masyarakat memerlukan suatu ketertiban sosial tertentu yang dapat dikembalikan pada proses interaksi sosial antarwarganya. Menurut Blumer, istilah interaksi simbolik menunjuk kepada sifat khas dari interaksi antar manusia. Kekhasannya adalah bahwa manusia sakling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Bukan hanya sekedar reaksi belaka dari tindakan seseorang terhadap orang lain. Tanggapan seseorang tidak dibuat secara langsung, tetapi didasarkan atas makna yang diberikan terhadap tindakan orang lain itu.¹⁰

Teori interaksi simbolis ini pada pokoknya mempunyai asumsi-asumsi dasar sebagai berikut :¹¹

1. Dasar dari pendekatan masyarakat sebagai suatu sistem sosial adalah subjektivitas perilaku individu
2. Subjektivitas perilaku manusia terproses dan terbentuk melalui hubungan-hubungan intersubjektivitas atau komunikasi
3. Proses komunikasi antar manusia yang dilakukan secara kontinu membentuk pribadi manusia dan kesadaran sosialnya
4. Melalui proses interaksi yang kontinu, manusia akan dapat membatasi pribadinya terhadap pengaruh sosial atau alam, sebagaimana bersamaan dengan jalannya proses simbolisasi melalui pembentukan bahasa dan tanda-tanda.
5. Dengan berdasarkan proses tersebut di atas, manusia akan mengetahui peranannya dan peranan pihak lainnya, yaitu rekan-rekan anggota sesame masyarakat.

¹⁰ George Ritzer, *Op.Cit.*, h. 61.

¹¹ Munir Fuady, *Op.Cit.*, h. 97-98.

6. Perilaku manusia bukanlah sekedar gerak badaniah belaka, karena melalui pendekatan tersebut di atas, dapatlah diketahui dasar-dasar perilaku manusia, baik yang nyata maupun yang tidak nyata.

Teori konflik juga mengatakan bahwa konflik itu perlu agar terciptanya perubahan sosial. Ketika struktural fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat itu selalu terjadi pada titik ekulibrium, teori konflik melihat perubahan sosial disebabkan karena adanya konflik-konflik kepentingan. Namun pada suatu titik tertentu, masyarakat mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama. Di dalam konflik, selalu ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan sehingga terciptalah suatu konsensus.

Konflik pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari tapi juga dibutuhkan oleh masyarakat, karena konflik mempertegas identitas-identitas dalam kelompok dan membentuk dasar stratifikasi sosial. Walaupun teori konflik klasik pada dasarnya sudah tidak dapat digunakan untuk menganalisis fenomena konflik kontemporer, karena teori ini diciptakan pada konteks kesejarahan yang berbeda dan perubahan struktur dan dinamika masyarakat telah diluar imajinasi para ilmuwan teori konflik klasik. Namun antara teori klasik dan teori kontemporer pada dasarnya sepakat bahwa konflik memainkan peran sentral dalam kehidupan karena mampu menjadi agen perubahan dan menjadi motor yang memobilisasi tindakan sosial.

Konflik terjadi antar kelompok memperebutkan hal yang sama, tetapi konflik akan menuju ke arah kesepakatan (*consensus*). Selain itu masyarakat tak mungkin terintegrasi secara permanen dengan mengandalkan kekuasaan dari paksaan dari kelompok yang dominan. Sebaliknya, masyarakat yang terintegrasi atas dasar konsensus sekalipun, tak mungkin bertahan secara permanen tanpa adanya kekuasaan paksaan. Jadi, konflik dan konsensus merupakan gejala-gejala yang terelakkan dalam masyarakat.

Konflik dapat memberika sumbangan terhadap integrasi dan sebaliknya integrasi dapat pula meklahirkan konflik. Pierre van den Berghe mengemukakan empat fungsi konflik yaitu :

1. Sebagai alat untuk memelihara solidaritas

2. Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain
3. Mengaktifkan peran individu yang semula terisolasi
4. Fungsi komunikasi. Sebelum konflik kelompok tertentu mungkin tidak mengetahui posisi lawan. Tapi dengan adanya konflik, posisi dan batas antara kelompok menjadi lebih jelas. Individu dan kelompok tahu secara pasti dimana mereka berdiri dan karena itu dapat mengambil keputusan lebih baik untuk bertindak dengan leih tepat.¹²

Menurut teori konflik moderen, masyarakat sebagai suatu sistem dimana sistem evolusi persaingan kelompok dilakukan demi sumber-sumber ekonomi dan dikontrol oleh sekelompok elite tertentu yang mendominasi kelompok tersebut. Oleh karena itu teori konflik moderen berisikan analisis sosiologis tentang konflik dalam masyarakat industri kontemporer dengan asumsi dasar sebagai berikut :¹³

1. Terjadinya suatu sistem kompetisi kelompok atau kepentingan
2. Industrialisasi memberikan kontribusi terhadap bentuk-bentuk dominasi kapitalis, sentralisasi, dan para elitisme
3. Berdasarkan beberapa kondisi tertentu dari organisasi sosial, timbullah konflik sosial/kelas
4. Suatu konflik sosial akan muncul manakala terjadi kelangkaan sumber dari luar dan monopoli
5. Kontribusi dari konflik sosial selanjutnya adalah evaluasi masyarakat dan adaptasi.

Suatu konflik memiliki paradigma konvensional dan paradigma kontemporer, yaitu :¹⁴

Paradigma Konvensional :

1. Konflik tidak dapat dihindarkan
2. Konflik disebabkan oleh kesalahan manajemen atau penguasa
3. Konflik mengganggu organisasi dan menghalangi pelaksanaannya secara optimal

¹² George Ritzer, *Op. Cit.*, h. 34.

¹³ Munir Fuady, *Op. Cit.*, h. 100.

¹⁴ Trubus Rahardiansah, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2005), h. 175.

4. Tugas manajemen atau pemimpin adalah menghilangkan konflik
5. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang optimal membutuhkan penghapusan konflik

Paradigma Kontemporer :

1. Konflik dapat dihindarkan
2. Konflik disebabkan oleh banyak sebab termasuk karena struktur organisasi, perbedaan tujuan, perbedaan persepsi, nilai-nilai pribadi, dsb.
3. Konflik dapat membantu atau menghambat pelaksanaan organisasi (masyarakat) dalam berbagai derajat.
4. Tugas manajemen/ pemimpin adalah mengelola tingkat dari konflik dan penyelesaiannya
5. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang optimal membutuhkan tingkat konflik yang moderat

C. Penyebab Konflik

Secara konseptual konflik merupakan pertentangan antara dua orang atau lembaga, yang disebabkan adanya perbedaan dalam mencapai kebutuhannya. Oleh sebab itu konflik merupakan kondisi dimana tidak ada kepercayaan antarpersonal maupun kelompok yang ada di masyarakat. Dalam banyak kasus, konflik terjadi karena adanya berbagai persepsi negative yang berkembang di dalam masyarakat. Anggota masyarakat diliputi suasana saling curiga, jika terus berkembang maka hal ini akan menimbulkan disharmona dan krisis relasi social. ketika telah terjadi krisis relasi social, sekiranya ada momentum apa lagi jika dibarengi dengan hadirnya provokator mempermudah timbulnya berbagai konflik, baik dalam bentuk penjarahan, perusakan, pembakaran, penganiayaan, bahkan pembunuhan.

Sementara itu, konflik tidak selalu bersifat negatif seperti diduga banyak orang. Apabila ditelaah secara seksama, konflik mempunyai fungsi positif yaitu sebagai pengintegrasian masyarakat dan sebagai sumber perubahan.

Harus dibedakan antara konflik dan kekerasan. Konflik dan kekerasan adalah hal yang berbeda, tidak semua konflik memiliki unsur kekerasan. Apabila dapat dikendalikan tidak serta merta konflik bermakna negatif, sebaliknya jika konflik berkembang semakin liar dapat dipastikan akan meningkat ke

dalam bentuk kekerasan. Dapat dikatakan konflik tidak selamanya identik dengan kekerasan, namun kekerasan dapat terjadi disebabkan adanya konflik¹⁵

Ada banyak teori yang menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya konflik. Salah satu diantaranya menyebutkan bahwa timbulnya konflik karena beberapa hal berikut : *pertama*, teori hubungan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa konflik terjadi disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam masyarakat. *Kedua*, teori negosiasi konflik. Teori ini menganggap bahwa konflik terjadi karena posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. *Ketiga*, teori kebutuhan manusia. Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia (fisik, mental, dan social) yang tidak terpenuhi atau terhalangi. *Keempat*, teori identitas. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan dimasa lalu yang tidak selesai. *Kelima*, teori kesalahpahaman antarbudaya. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan cara-cara berkomunikasi antarberbagai budaya yang berbeda. *Keenam*, teori transformasi konflik yang menyatakan bahwa konflik disebabkan oleh ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah social, budaya, dan ekonomi.¹⁶

Jika kita membicarakan konflik politik, maka akan dibedakan antara konflik yang positif dan konflik yang negatif :

1. Konflik positif; Konflik yang tak mengancam eksistensi sistem politik, yang biasanya disalurkan melalui mekanisme pengaturan konflik yang telah disepakati dalam konstitusi. Mekanisme yang dimaksud ialah lembaga-lembaga demokrasi seperti partai politik badan perwakilan rakyat, pengadilan, pers, dll.
2. Konflik negatif; konflik yang dapat mengancam eksistensi sistem politik yang biasanya disalurkan melalui cara-cara

¹⁵ Abdul Jamil Wahab, *Op. Cit.*, h. 7.

¹⁶ Simon Fisher, *Manajemen Konflik Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak* (Jakarta : British Council, 2000), h. 4.

nonkonstitusional, seperti kudeta, separatisme, terorisme, dan revolusi.¹⁷

Kategorisasi ini mengandung kelemahan. Apabila mayoritas masyarakat memandang lembaga dan struktur yang ada tidak mencerminkan kepentingan umum maka konflik yang disalurkan melalui mekanisme politik justru dipandang sebagai konflik negatif.

Sehubungan dengan konflik positif dan negatif, maka masyarakat dapat dikelompokkan menjadi 2 tipe yaitu :

1. Masyarakat yang mapan; artinya masyarakat yang memiliki dan mendayagunakan struktur kelembagaan yang diatur dalam konstitusi. Konflik yang dianggap positif dalam masyarakat ini berupa konflik yang disalurkan melalui struktur kelembagaan, sedangkan konflik yang negatif berupa tindakan yang menentang struktur yang ada dan disalurkan melalui cara-cara diluar struktur itu.
2. Masyarakat yang belum mapan; artinya masyarakat yang belum memiliki struktur kelembagaan yang mendapat dukungan penuh dari seluruh masyarakat. Biasanya struktur kelembagaan yang diatur dalam konstitusi selain tidak didukung oleh sebagian masyarakat, juga belum berfungsi sebagaimana mestinya. Konflik yang dianggap positif dalam masyarakat ini acap kali justru konflik yang disalurkan melalui cara-cara diluar struktur kelembagaan yang ada karena dianggap lebih efektif.¹⁸

Pada dasarnya konflik terjadi karena adanya kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal. Kemajemukan horizontal ialah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agama, ras, dan majemuk secara sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi, seperti buruh, tani, PNS, dan sebagainya. Sedangkan kemajemukan vertikal adalah struktur masyarakat yang terpolarisasi menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Akan tetapi kenyataan menunjukkan perbedaan kepentingan karena kemajemukan horizontal dan

¹⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1999), h. 153.

¹⁸ *Ibid.*

vertikal tidak dengan sendirinya menimbulkan konflik. Hal ini disebabkan karena adanya fakta sejumlah masyarakat yang mau menerima perbedaan-perbedaan tersebut.¹⁹

D. Pengaturan Konflik

Ada beberapa bentuk dan proses penyelesaian konflik yaitu menghindari (*avoidance*), pemecahan masalah secara informal (*Informal problem solving*), bernegosiasi (*negotiation*), munculnya pihak ketiga yang mengadakan mediasi (*mediation*), kemunculan pihak lain yang memberikan bentuk penyelesaian (*executive dispute resolution approach*), pihak yang bertikai mencari pihak ketiga yang dipandang netral (*arbitration*), intervensi pihak berwenang dalam member kepastian hukum (*judicial approach*), dan penanganan oleh pihak yang memiliki kekuatan legal (*extra legal approach*).²⁰

Menurut Ralf Dahrendorf, pengaturan konflik yang efektif sangat bergantung pada 3 faktor yaitu :

1. Kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik yang terjadi di antara mereka.
2. Kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisasi secara rapi, tidak tercerai berai dan terkotak-kotak sehingga masing-masing pihak memahami dengan jelas lingkup tuntutan pihak lain.
3. Kedua pihak menyepakati aturan main yang menjadi landasan dan pegangan dalam hubungan dan interaksi diantara mereka²¹

Dahrendorf juga menyebutkan 3 bentuk pengaturan konflik yaitu :

1. Konsiliasi; Parlemen dalam mana semua pihak berdiskusi dan berdebat secara terbuka dan mendalam untuk mencapai kesepakatan tanpa ada pihak-pihak yang memonopoli pembicaraan dan memaksa-kan kehendak. Kebanyakan konflik politik disalurkan dan diatur dengan bentuk konsiliasi.
2. Mediasi; kedua pihak sepakat mencari nasihat dari pihak ketiga (seorang mediator berupa tokoh, ahli, atau lembaga tertentu yang dipandang mempunyai pengetahuan dan

¹⁹*Ibid*, h. 152.

²⁰ Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 177-178.

²¹ Ramlan Surbakti, *Op. Cit.*, h. 160.

keahlian yang menda-lam mengenai hal yang dipertentangkan) tetapi nasihat yang diberikan oleh mediator ini tidak mengikat mereka.

3. Arbitrasi; Kedua pihak sepakat untuk mendapatkan keputusan akhir (yang bersifat legal) sebagai jalan keluar konflik pada pihak ketiga sebagai arbitrator. Contoh pengadilan.²²

Perilaku konflik merupakan berbagai bentuk perilaku yang diciptakan seseorang atau kelompok untuk membantu mencapai apa yang menjadi tujuan, mengekspresikan permusuhan pada musuh atau pesaing mereka. Perilaku konflik ini bisa dibagi dalam tindakan koersif dan nonkoersif. Tindakan koersif (*coercive action*) merupakan bentuk tindakan social yang memaksa pihak lawan untuk melakukan sesuatu yang pihak lawan tidak ingin melakukannya. Tindakan koersif kemudian terbagi menjadi dua yaitu koersif nyata yang muncul dalam bentuk melukai atau membunuh lawan, bisa juga dalam bentuk serangann psikologis, sedangkan koersif ancaman berusaha menekan agar lawan menurunkan keinginan pada tahap tertentu.²³

Menurut William Hendricks, suatu konflik dapat dikelola dengan suatu manajemen konflik sosial. Gaya manajemen konflik sosial itu adalah :

1. Model mempersatukan (*integrating*);
Dalam hal ini, terjadi saling menukar informasi, dan saling menjajaki perbedaan dan persamaan-persamaan
2. Model membantu (*obliging*);
Model yang memberikan nilai yang tinggi kepada pihak lawan dengan mengabaikan atau menganggap rendah dirinya sendiri
3. Model mendominasi (*diminating*);
Merupakan lawan dari gaya *obliging*
4. Model menghindar (*avoiding*)
5. Model kompromistis (*compromising*);

²² *Ibid.*

²³ Novri Susan, *Op. Cit.*, h. 63-64.

Perhatian atas dirinya sendiri dengan perhatian terhadap orang lain sama besarnya, yang berlaku adalah prinsip musyawarah (*win win solution*)²⁴

E. Penutup

Konflik memang tidak dapat dihindari, tetapi sedapat mungkin harus diselesaikan secara bijak. Dalam masyarakat yang rentan, baik dalam hal budaya, ekonomi, dan politik, maka konflik akan mudah mengarah pada hal destruktif, bahkan konflik bisa diikuti oleh bentuk-bentuk kekerasan, seperti perang dan pembantaian. Namun pada masyarakat yang memiliki kapasitas tinggi maka sangat mungkin konflik dapat mendinamisasi perubahan ke arah yang konstruktif dan positif.

Penyelesaian suatu konflik pada umumnya akan sangat bergantung pada faktor internal dan eksternal. faktor internal adalah bagaimana pihak-pihak yang berkonflik menyikapi konflik yang dihadapinya, sedangkan faktor eksternal adalah bagaimana pihak luar berperan dalam melakukan penanganan konflik. Untuk itu penting dibuat suatu perencanaan dan langkah tata pengelolaan konflik dalam bentuk pembangunan perdamaian.

Daftar Pustaka

- Abdul Jamil Wahab, *Manajemen Konflik Keagamaan Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual* (Jakarta : Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia 2014)
- George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta : Rajawali 1985)
- Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2004)
- Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, kekuasaan, dan Masyarakat* (Bandung : Citra Aditya Bakti 2007)
- Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Kontemporer*, (Jakarta : Kencana 2010)
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta : Grasindo 1999)

²⁴ Munir Fuady, *Op. Cit.*, h. 23.

Ellya Rosana, Konflik Pada Kehidupan,.....

Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009)

Simon Fisher, *Manajemen Konflik Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak* (Jakarta : British Council 2000)

Trubus Rahardiansah, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2005)

*Ellya Rosana, S.Sos. M.H. Dosen Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung. Alumni Program Pasca Sarjana Universitas Lampung.